



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) SIDOARJO

Lailatul Fitriah
212020100009

Administrasi Publik
Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. MAN Sidoarjo dipilih sebagai lokasi penelitian karena belum terdapat studi sebelumnya yang membahas topik serupa. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan memilih informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi Kurikulum Merdeka. Penelitian ini berfokus pada empat indikator implementasi kebijakan berdasarkan model George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder yang mendukung analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pengelolaan informasi berupa pengembangan pusat informasi yang terpusat untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi semua pihak terkait, (2) Pengembangan kompetensi tenaga pendidik melalui peningkatan partisipasi dalam pelatihan dan workshop yang relevan, (3) Penguatan koordinasi dan optimalisasi pemeliharaan fasilitas untuk memastikan keberlangsungan operasional yang lebih baik, (4) Penyelarasan koordinasi antarunit untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, (5) Perencanaan waktu persiapan yang lebih sistematis serta distribusi juknis dan SOP yang merata untuk mendukung kelancaran implementasi.

Kata kunci: *Implementasi; Kebijakan; Kurikulum Merdeka.*



Pendahuluan

Pendidikan adalah elemen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kemajuan suatu bangsa. Sebagai kunci keberhasilan dalam persaingan global, pendidikan membutuhkan pembaruan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pembaruan kurikulum yang selaras dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam proses pendidikan, mencakup tujuan pembelajaran serta isi kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Tanpa pembaruan, sistem pendidikan di Indonesia berisiko tertinggal dari negara lain, bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Indonesia telah beberapa kali memperbarui kurikulumnya, mulai dari tahun 1947 mencakup penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 (K-13), hingga yang terbaru, yaitu Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Projek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Projek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.

Pendahuluan

Pembuatan kebijakan terkait Kurikulum Merdeka diatur melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022, yang menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai langkah strategis untuk memulihkan proses pembelajaran pascapandemi. Salah satu poin kebijakan ini adalah penyederhanaan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Struktur kurikulum tersebut terdiri atas dua kegiatan utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil Pelajar Pancasila. Selain itu, kebijakan ini diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 12 Tahun 2024, yang menguraikan cakupan dan implementasi Kurikulum Merdeka untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah di Indonesia. Termasuk dalam aturan ini adalah ketentuan peralihan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. Berdasarkan dasar hukum tersebut, setiap provinsi di Indonesia diwajibkan menyesuaikan diri dengan kurikulum baru ini. Data jumlah pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pada satuan pendidikan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Pelaksanaan IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) Pada Satuan Pendidikan Tahun 2024

No	Provinsi	Jumlah Sekolah
1.	Aceh	8.059
2.	Sumatera Utara	19.920
3.	Sumatera Barat	9.130
4.	Sumatera Selatan	10.202
5.	Riau	9.080
6.	Jambi	5.595
7.	Bengkulu	2.886
8.	Lampung	11.729
9.	KEP. Bangka Belitung	2.080
10.	KEP. Riau	2.524
11.	Banten	11.050
12.	DKI Jakarta	6.986
13.	Jawa Barat	50.140
14.	Jawa Tengah	52.034
15.	DI Yogyakarta	6.517
16.	Jawa Timur	52.454
17.	Bali	4.981

No	Provinsi	Jumlah Sekolah
18.	NTB	8.780
19.	NTT	9.625
20.	Kalimantan Barat	7.705
21.	Kalimantan Tengah	5.053
22.	Kalimantan Selatan	7.995
23.	Kalimantan Timur	5.023
24.	Kalimantan Utara	1.238
25.	Sulawesi Utara	4.811
26.	Sulawesi Tengah	6.660
27.	Sulawesi Selatan	14.197
28.	Sulawesi Tenggara	4.742
29.	Gorontalo	2.822
30.	Sulawesi Barat	3.206
31.	Maluku	3.199
32.	Maluku Utara	2.717
33.	Papua Barat	944
34.	Papua	1.283

Pendahuluan

Berdasarkan Tabel 1.1 menjelaskan bahwa seluruh provinsi Indonesia telah menerapkan IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) pada tahun 2024. dengan melihat data per provinsi, dapat dilihat provinsi mana yang lebih maju dalam penerapan kurikulum ini, salah satunya yakni: Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur menjadi pelaksana IKM jalur Mandiri terbanyak se Indonesia dengan jumlah kepesertaan mencapai 52.454 lembaga. Dengan PAUD/TK 28.432 Satuan Pendidikan, SD/Setara 18.921 Satuan Pendidikan, SMP/Sederajat 4.839 Satuan Pendidikan, SMA/Sederajat 1.525 Satuan Pendidikan, SMK/Sederajat 2.101 Satuan Pendidikan, Pendidikan Komunitas 580 Satuan Pendidikan. Salah satu sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka di Provinsi Jawa Timur khususnya di Kabupaten Sidoarjo adalah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo.

MAN Sidoarjo merupakan satu-satunya lembaga pendidikan setingkat SMA/MA Negeri yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini membuat lembaga tersebut mendapatkan perhatian besar dari masyarakat setempat, yang mayoritas beragama Islam. Tingginya kepercayaan ini tercermin dari terus meningkatnya jumlah calon siswa baru setiap tahun. Namun, karena keterbatasan kapasitas, tidak semua pendaftar dapat diterima sebagai siswa. Sejak tahun ajaran 2022/2023, MAN Sidoarjo telah menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar dalam proses pembelajaran.

Dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di MAN Sidoarjo, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam upaya penerapannya. Perubahan paradigma pendidikan yang diusung Kurikulum Merdeka membutuhkan adaptasi besar, Namun, satu tantangan besar yang muncul adalah pusat sumber informasi yang belum terintegrasi dengan baik, sehingga menimbulkan banyak penafsiran terhadap kebijakan dan metode yang harus diterapkan. Akibatnya, koordinasi antar pihak menjadi kurang efektif, dan hasil kegiatan tidak optimal. Masalah ini diperparah oleh rendahnya partisipasi guru dalam pelatihan dan workshop yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam penerapan Kurikulum Merdeka.



Pendahuluan

Berdasarkan data absensi pelatihan di MAN Sidoarjo, banyak guru yang tidak hadir atau tidak mengikuti pelatihan dengan baik, baik karena jadwal yang kurang terorganisasi, kurangnya sosialisasi, maupun ketersediaan sumber daya yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan pemahaman terhadap Kurikulum Merdeka menjadi tidak merata di antara para guru, sehingga implementasi kebijakan di lapangan sering kali tidak seragam dan kurang optimal. Hal tersebut diperkuat oleh data berikut ini.

Tabel 1.2
Data Absensi Pelatihan (Workshop) Kurikulum Merdeka MAN Sidoarjo Tahun 2022 – 2024

Tahun	Jumlah Guru	Jumlah Kehadiran Guru
2022	104	75
2023	104	84
2024	104	81

Sumber : MAN Sidoarjo, 2024

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat data kehadiran guru MAN Sidoarjo yang mengikuti pelatihan workshop kurikulum merdeka selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, dari total 104 guru, hanya 75 guru yang hadir dalam pelatihan tersebut. Pada tahun 2023, jumlah kehadiran meningkat menjadi 84 guru, sementara pada tahun 2024, kehadiran sedikit menurun menjadi 81 guru. Perubahan kehadiran ini dapat menggambarkan dinamika partisipasi guru terhadap pelatihan Kurikulum Merdeka, yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kesadaran, kesiapan, atau kendala tertentu yang dihadapi. Kondisi ini menyebabkan pemahaman terhadap Kurikulum Merdeka menjadi tidak merata di antara para guru, sehingga implementasi kebijakan di lapangan sering kali tidak seragam dan kurang optimal. Rendahnya partisipasi dalam pelatihan menjadi tantangan yang harus segera diatasi untuk memastikan keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka secara menyeluruh dan berkesinambungan. Hal tersebut menjadi salah satu komponen penting untuk memastikan implementasi Kurikulum Merdeka berjalan lancar. Permasalahan tersebut belum selaras dengan teori pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980).

Penelitian Terdahulu

Ishma Shafiyatu Sa'diyah,dkk. (2023) dengan judul “Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Jenjang SMA”

Dalam penelitian ini diungkapkan menunjukkan bahwa implementasi kurikulum merdeka belajar di SMA Negeri 1 Plered telah memberikan manfaat dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Selain itu, guru juga merasakan perubahan positif dalam pendekatan pembelajaran dan penilaian. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi kurikulum merdeka belajar, seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman yang belum merata di kalangan guru. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih lanjut untuk memperbaiki dan mengoptimalkan implementasi kurikulum merdeka belajar di jenjang SMA.

Dewa Nyoman Redana,dkk. (2023) dengan judul “Implementasi Kurikulum Merdeka Di SMA Negeri 4 Singaraja”

Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa menunjukkan dari implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja adalah tersedianya sumber daya yang cukup memadai untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Juga karena isi dari kurikulum tersebut cukup mudah untuk dipahami sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah masih minimnya kemampuan implementor dalam hal ini masih banyaknya guru-guru di SMA Negeri 4 Singaraja yang belum memahami isi dari kurikulum merdeka sehingga mereka agak sulit untuk melaksanakannya dalam proses pembelajaran.

Mardiana & Emmiyati. (2024) dengan judul “Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran: Evaluasi Dan Pembaruan”

Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa peningkatan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, dengan pendekatan berbasis proyek dan kontekstual. Peran guru berubah menjadi lebih sebagai fasilitator pembelajaran dengan keberhasilan adaptasi terhadap peran baru. Meskipun terdapat kemajuan dalam penggunaan teknologi, masih terdapat kendala terkait infrastruktur dan ketersediaan perangkat. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka, termasuk dukungan orang tua dan pihak sekolah, serta strategi pembaruan yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Rekomendasi pembaruan mencakup pelatihan guru berkelanjutan, investasi infrastruktur teknologi, peningkatan komunikasi dengan orang tua, dan integrasi rencana karir dalam kurikulum.

Gap Masalah Penelitian dan Teori

Berdasarkan observasi di lapangan, ditemukan beberapa masalah yang menunjukkan kesenjangan antara harapan kebijakan Kurikulum Merdeka dan realitas implementasinya, antara lain:

- 1. Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana** yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi.
- 2. Kesiapan guru** dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka yang masih bervariasi, sebagian guru belum mengikuti pelatihan secara optimal.
- 3. Konsistensi penerapan** antar kelas dan mata pelajaran yang belum seragam, sehingga menimbulkan perbedaan mutu pembelajaran.
- 4. Dukungan manajemen sekolah** yang belum maksimal dalam memfasilitasi inovasi dan kreativitas guru.
- 5. Pemahaman siswa** terhadap tujuan dan metode Kurikulum Merdeka yang masih rendah, sehingga partisipasi aktif belum optimal.

Penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) SIDOARJO”** ini menggunakan fokus indikator teori Implementasi Kebijakan model Edward III terbagi menjadi empat indicator utama yang saling berkaitan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Pelaksana, Struktur Birokrasi.

Metode Penelitian

- **JENIS PENELITIAN**

Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif

- **FOKUS MASALAH**

Berfokus pada “Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo” menurut teori **George C. Edward III (1980:1)** :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi/Sikap Pelaksana
4. Struktur Birokrasi

- **LOKASI PENELITIAN**

Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo, Siwalanpanji, Kec.Buduran Kab.Sidoarjo

- **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

- Observasi Lapangan
- Wawancara
- Dokumentasi

- **SUMBER DATA**

- Data Primer
- Data Sekunder

- **TEKNIK PENENTUAN INFORMAN**

Purposive Sampling (Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan)

- **INFORMAN PENELITIAN**

- Kepala Madrasah MAN Sidoarjo
- Waka Kurikulum MAN Sidoarjo



Hasil dan Pembahasan

1. Komunikasi

Transmisi Berkaitan dengan keberhasilan penyebaran konsep atau kebijakan, memastikan bahwa mereka dipahami dan diterima oleh semua pihak terkait.

- Berdasarkan hasil wawancara tersebut, jelas **bahwa rapat kerja rutin yang dilakukan di MAN Sidoarjo berperan penting dalam penentuan struktur kurikulum yang akan diterapkan. Proses ini melibatkan diskusi mendalam mengenai penyusunan mata pelajaran, tujuan pembelajaran, dan metode pengajaran yang akan diterapkan oleh guru selama satu tahun ajaran.** Hal ini mencerminkan upaya yang sistematis dan terorganisir untuk memastikan implementasi Kurikulum Merdeka berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan.

Ketidakjelasan dan penyebaran informasi yang tidak merata, yang menjadi masalah utama dalam penerapan Kurikulum Merdeka. **Berhubungan erat dengan kurangnya sistem komunikasi yang terpusat dalam perencanaan dan implementasi kurikulum.** Meskipun rapat kerja rutin telah disiapkan dengan baik untuk menyusun struktur kurikulum, tanpa adanya komunikasi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik antara pihak-pihak terkait (seperti guru, siswa, dan kepala madrasah), pemahaman yang seragam sulit tercapai.

- Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan **bahwa meskipun ada semangat dan antusiasme yang tinggi dari seluruh pihak terkait, tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan Kurikulum Merdeka adalah kurangnya pusat informasi yang terpusat.** Hal ini menyebabkan informasi yang diterima oleh berbagai pihak seperti guru, siswa, kepala madrasah tidak konsisten, yang pada gilirannya menimbulkan berbagai penafsiran berbeda. Karena itu, koordinasi antar pihak jadi kurang efektif dan hasil pelaksanaan kurikulum tidak optimal.



Hasil dan Pembahasan

Upaya untuk meningkatkan frekuensi rapat kerja, memastikan pelatihan yang tepat waktu, dan memperbaiki sistem komunikasi sangat penting untuk menciptakan konsistensi dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Hal ini akan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat bekerja dengan arah dan tujuan yang sama, sehingga implementasi kurikulum dapat berjalan lebih efektif.

- Berdasarkan Wawancara, dapat di jelaskan bahwa di **MAN Sidoarjo**, pelatihan dan sosialisasi merupakan bagian penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Workshop untuk guru dilakukan menjelang liburan akhir tahun dan dapat melibatkan narasumber dari universitas atau sekolah yang memiliki tenaga ahli terkait dengan kurikulum tersebut.
- Berbagai metode pelatihan yang diterapkan, seperti pelatihan offline dengan mendatangkan narasumber ahli, dan pelatihan online yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
- Pelatihan untuk tenaga pendidik, sosialisasi kepada wali murid juga menjadi perhatian, yang dilakukan sekali setiap akhir semester bersamaan dengan pengambilan rapor, untuk memastikan wali murid mendapatkan informasi yang jelas mengenai kegiatan yang dilakukan di sekolah.

Gambar 1. Pelatihan Workshop dan Kegiatan Sosialisasi Wali Murid di MAN Sidoarjo



Hasil dan Pembahasan

Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen utama yang menentukan kesuksesan pelaksanaan kebijakan publik, **Dalam konteks ini, rendahnya partisipasi guru dalam pelatihan dan workshop menjadi salah satu bentuk keterbatasan sumber daya manusia dalam mendukung penerapan Kurikulum Merdeka.** Perubahan ini mencerminkan dinamika partisipasi guru terhadap pelatihan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kesadaran, kesiapan, atau kendala teknis tertentu.

- Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa **rendahnya partisipasi guru dalam pelatihan dan workshop Kurikulum Merdeka disebabkan oleh resistensi terhadap perubahan mindset.** Banyak guru yang masih merasa nyaman dengan metode **pembelajaran lama dan kurang termotivasi untuk mengikuti pelatihan.** Hal ini menjadi tantangan serius dalam penerapan Kurikulum Merdeka, karena tanpa adanya perubahan cara pandang yang lebih terbuka dan kesiapan untuk beradaptasi, implementasi kurikulum ini tidak dapat berjalan secara optimal. Upaya untuk mengatasi kendala ini memerlukan strategi yang dapat mendorong guru agar lebih antusias mengikuti pelatihan, seperti penyampaian manfaat konkret dari kurikulum baru, pendekatan yang relevan, dan dukungan yang berkelanjutan

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai MAN Sidoarjo Tahun 2024	
Jumlah Pegawai MAN	
Guru Mata Pelajaran	61
Pegawai PPPK	10
Pegawai GTT	12
Pegawai PTT	21
Total Keseluruhan	104

Sumber: MAN Sidoarjo, 2024

Tingginya jumlah Guru Mata Pelajaran yang menjadi bagian terbesar dari tenaga pendidik menunjukkan peran sentral mereka dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Namun, **rendahnya partisipasi guru dalam pelatihan dan workshop Kurikulum Merdeka dapat dikaitkan dengan resistensi terhadap perubahan mindset.**

Hasil dan Pembahasan

Anggaran yang cukup memungkinkan pelatihan guru dilakukan secara berkesinambungan, sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dengan baik. Selain itu, sarana-prasarana. Dengan dukungan sumber daya ini, guru dapat lebih fokus pada inovasi pembelajaran, mendorong kreativitas siswa, dan meningkatkan hasil belajar yang optimal. Hal ini juga mencerminkan komitmen madrasah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang relevan dan bermakna sesuai dengan visi Kurikulum Merdeka.

- Berdasarkan wawancara, menunjukkan bahwa untuk merealisasikan keberhasilan pendidikan, terutama dalam penerapan Kurikulum Merdeka, harus ada anggaran yang disiapkan baik melalui dana komite sekolah maupun dana pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini menegaskan pentingnya dukungan finansial agar implementasi kurikulum tersebut dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang menggambarkan anggaran pendidikan selama periode 2022 hingga 2024 di MAN Sidoarjo.

Tabel 3.2 Data Anggaran Pendidikan MAN Sidoarjo Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Siswa	Total Anggaran (IDR)	Dana BOS (IDR)	Dana Non-BOS (IDR)	Alokasi per Siswa (IDR)
2022	396	1.584.000.000 (396 × 300.000)	118.800.000 (396 × 300.000)	1.465.200.000	4.000.000
2023	458	1.832.000.000 (458 × 300.000)	137.400.000 (458 × 300.000)	1.694.600.000	4.000.000
2024	472	1.888.000.000 (472 × 300.000)	141.600.000 (472 × 300.000)	1.746.400.000	4.000.000

Sumber: MAN Sidoarjo, 2024

Keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya bergantung pada kompetensi guru, tetapi juga pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. bahwa MAN Sidoarjo memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Namun, evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas ini perlu dilakukan secara berkala agar dampaknya terhadap kualitas pendidikan lebih optimal.

Tabel 3.3 Sarana dan Prasarana di MAN Sidoarjo

No.	Ruang	Jumlah
1.	Kelas	36
2.	Laboratorium Kimia	1
3.	Laboratorium Biologi	1
4.	Laboratorium Fisika	1
5.	Laboratorium Komputer	1
6.	Laboratorium Komputer	1
7.	Perpustakaan	1
8.	Kepala MAN	1
9.	TU	1
10.	BK	1
11.	UKS	1
12.	Komite	1
13.	Masjid	1
14.	Keterampilan Menjahit	1
15.	Keterampilan Boga	1
16.	Galery Seni	1
17.	Alat Ekstra	1
18.	Osis	1

Sumber:Ditolah oleh MAN Sidoarjo, 2024



Hasil dan Pembahasan

Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi ialah sikap atau kecenderungan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dalam menerima, memahami, dan melaksanakan kebijakan dengan penuh tanggung jawab. Indikator disposisi ini mengacu pada respons, komitmen, serta pemberian insentif yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan secara optimal.

Respons positif berupa dukungan dan persetujuan guru mencerminkan sikap yang konstruktif terhadap perubahan, yang menjadi landasan utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sikap ini tidak hanya membantu dalam membangun komitmen kolektif di tingkat sekolah, tetapi juga memberikan motivasi bagi siswa untuk lebih mudah beradaptasi dengan kurikulum baru.

- Berdasarkan penjelasan wawancara tersebut, penerapan Kurikulum Merdeka di MAN Sidoarjo dapat dianggap berhasil karena disposisi positif para guru yang mendukung dan menerima kebijakan tersebut. Sikap ini penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang pada gilirannya memotivasi siswa untuk beradaptasi dengan kurikulum baru. Meskipun ada kekhawatiran awal dari wali murid, seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan manfaat dan dampak positif dari penerapan kurikulum ini. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada dukungan kolektif dari guru, siswa, dan wali murid, serta kepemimpinan kepala madrasah yang efektif dalam mengarahkan perubahan tersebut.

Gambar 2. Rapat Implementasi
Kurikulum Merdeka



Hasil dan Pembahasan

Kepala madrasah memiliki peran penting dalam memastikan komitmen semua pihak terhadap tujuan Kurikulum Merdeka meskipun menghadapi tantangan. **Kepala madrasah tidak hanya berfokus pada respons positif dari guru, tetapi juga secara aktif memastikan bahwa semua elemen di MAN Sidoarjo tetap terjaga komitmennya.**

- Berdasarkan wawancara tersebut bahwa penerimaan terhadap kebijakan ini bukan hanya untuk kepentingan individu atau sekolah, tetapi juga untuk kepentingan negara secara lebih luas. Dengan mengedepankan komitmen bersama, kepala madrasah memastikan bahwa semua elemen di MAN Sidoarjo, terutama guru, menerima dan mendukung kebijakan tersebut tanpa ada penolakan.

Terlihat dalam upaya Kepala Madrasah untuk menciptakan motivasi dan dorongan bagi guru agar mendukung kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, **Kepala Madrasah memastikan bahwa tidak ada penolakan dari guru dan mendorong mereka untuk menerima aturan yang ada. Penerimaan terhadap kebijakan ini juga dapat didorong dengan pemberian insentif, baik dalam bentuk penghargaan, pengakuan atas kinerja yang baik, maupun fasilitas yang dapat memperbaiki kualitas pengajaran.**

- Berdasarkan wawancara tersebut **Kepala Madrasah menegaskan bahwa sebagai pegawai negeri yang dibayar oleh negara, guru di MAN Sidoarjo memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan, termasuk Kurikulum Merdeka, karena mereka sudah digaji oleh negara. Meskipun demikian, penghargaan tambahan dalam bentuk pengakuan atas kinerja, dedikasi, atau fasilitas untuk pengembangan profesionalisme dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan semangat dan komitmen guru.** Pemberian penghargaan ini berfungsi untuk memotivasi guru lebih jauh dalam mendukung dan mengimplementasikan kebijakan kurikulum dengan lebih optimal, memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan sukses di MAN Sidoarjo.



Hasil dan Pembahasan

Struktur Birokrasi

Fragmentasi dalam struktur birokrasi mengacu pada pemisahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar unit atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka di MAN Sidoarjo, pengelolaan fragmentasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa berbagai pihak, seperti kepala madrasah, guru, dan tenaga administrasi, dapat bekerja bersama secara harmonis untuk mencapai tujuan kebijakan. Hal ini membutuhkan komunikasi yang lancar, prosedur yang jelas, dan dukungan manajerial yang kuat untuk menyatukan berbagai elemen dalam struktur birokrasi.

- **Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi Kurikulum Merdeka, peran dan tanggung jawab setiap pihak sudah jelas, mulai dari kepala madrasah yang memonitoring pelaksanaan kurikulum, waka kurikulum yang mengelola silabus, hingga guru-guru yang bertanggung jawab untuk menjalankan tujuan pembelajaran dan capaian yang telah ditetapkan. Siswa sebagai objek penerima kurikulum juga terlibat dalam proses tersebut.** Selain itu, pemerintah turut berperan penting dalam mendukung implementasi kurikulum dengan menyediakan regulasi yang jelas, serta mengadakan pelatihan dan memberikan kesejahteraan kepada guru dan tenaga pendidik, termasuk PNS dan P3K, yang membantu kelancaran proses pendidikan.

Namun, ada **tantangan besar yang muncul akibat perubahan paradigma pendidikan yang diusung oleh kurikulum ini**. Perubahan tersebut memerlukan adaptasi yang signifikan dari semua pihak, namun keterbatasan waktu persiapan, kurangnya koordinasi, dan minimnya pelatihan menyebabkan banyak juknis dan SOP tidak dapat tersampaikan secara merata. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah dalam implementasi, seperti kesulitan dalam mengevaluasi hasil kerja karena tidak adanya standar yang baku sebagai acuan. Meskipun pemerintah sudah memberikan dukungan melalui regulasi, pelatihan, dan kesejahteraan bagi guru, tantangan dalam koordinasi dan pelaksanaan yang tidak konsisten tetap menjadi hambatan utama dalam pencapaian tujuan pendidikan yang efektif.



Hasil dan Pembahasan

- Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa **meskipun ada beberapa tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka, seperti kurangnya koordinasi antar pihak terkait, keterbatasan waktu persiapan, dan ketidakmerataan pelatihan untuk tenaga pendidik, pihak sekolah tetap berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Kurangnya pemahaman yang sama tentang kurikulum baru menyebabkan kesulitan dalam evaluasi dan pelaksanaan yang kurang konsisten.** Namun, pihak sekolah, melalui upaya peningkatan komunikasi dan pelatihan tepat waktu, berusaha memastikan bahwa setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya dengan jelas, sehingga implementasi kurikulum dapat lebih efektif dan terorganisir. Hal ini terlihat pada tabel berikut ini:

Berdasarkan tabel data SOP MAN Sidoarjo tersebut, dapat diketahui bahwa **pelaksanaan kegiatan kurikulum dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kepala Madrasah, Waka Kurikulum, Guru, hingga Tata Usaha (TU). Setiap aktivitas telah dijabarkan secara runut mulai dari penerimaan disposisi, penyusunan pembagian tugas mengajar, perencanaan perangkat pembelajaran, hingga pembuatan rapor dan monitoring.** Dalam pelaksanaannya, Waka Kurikulum berperan penting sebagai penghubung antara kepala dan guru dalam mendistribusikan tugas, sementara guru berperan dalam merancang kegiatan belajar dan membuat laporan hasil belajar siswa. Keterlibatan TU pada tahap akhir memastikan data teradministrasi dengan rapi. Seluruh kegiatan didukung oleh sarana seperti lembar disposisi, perangkat komputer, blanko, bolpoint, dan dokumen penilaian. Dari segi mutu baku, waktu pelaksanaan setiap kegiatan telah ditentukan secara efisien, yang bertujuan memastikan output yang optimal seperti tersusunnya perangkat ajar, distribusi nilai yang tepat, hingga tercapainya monitoring yang berkelanjutan oleh kepala madrasah. SOP ini menunjukkan bahwa MAN Sidoarjo telah mengupayakan tata kelola kurikulum yang tertib, terarah, dan terukur.

Tabel 3.4 Data SOP (Standar Operasional Prosedur) Kurikulum MAN Sidoarjo Tahun 2024

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Kepala	Waka Kurikulum	Guru	TU	Persyaratan / Perkembangan	Waktu	Output
1	Waka Kurikulum menerima disposisi dari Kepala					Lembar Disposisi	2 menit	Diterimanya Disposisi
2	Menyusun pembagian tugas mengajar dalam satu semester dan mendistribusikannya kepada seluruh guru pengajar					Komputer dan Alat cetak	1 Minggu	Tersampainya pembagian tugas mengajar kepada seluruh guru pengajar
3	Guru menyusun Silabus, RPP dan program semester untuk diinstruksikan sebagai buku ajar kepada siswa, serta melakukan absensi terhadap siswa untuk kemudian diterangkan kepada Tata Usaha					Blanko dan staff	30 hari	Telah dilaksananya kerjakan belajar mengajar dengan lancar, tertib dan teratur serta
4	Guru membuat rapor pada akhir semester					Bolpoint, nilai-nilai siswa, buku rapor	3 hari	Siswa menerima hasil belajar selama 1 semester
5	Wali kelas melakukan rekapitulasi dan kisi-kisi nilai dan menyorotkan pada TU untuk diaspiketik					Blanko, bolangko, leger, mesin cetak	7 hari	Terekapnya semua nilai rapor siswa ke dalam buku leger
6	Kepala melakukan evaluasi dan monitoring					Bolpoint, data	Sekali setiap bulan	KBM Tertib dan lancar

Sumber: Diolah oleh MAN Sidoarjo, 2024

Kesimpulan

- Dalam hal komunikasi, yaitu **kurangnya pusat informasi yang terpusat, yang menyebabkan penyebaran informasi tidak merata dan menghasilkan berbagai penafsiran yang berbeda mengenai kebijakan yang harus diterapkan**. Hal ini mengarah pada ketidakefektifan koordinasi dan pelaksanaan yang tidak konsisten.
- Pada indikator sumber daya, yaitu **rendahnya partisipasi guru dalam pelatihan dan workshop. Hal ini dipengaruhi oleh resistensi terhadap perubahan mindset, di mana banyak guru yang merasa nyaman dengan kurikulum lama dan kurang termotivasi untuk mengikuti pelatihan yang disediakan**. Akibatnya, pemahaman terhadap Kurikulum Merdeka menjadi tidak merata, yang berdampak pada ketidakefektifan implementasi kebijakan di lapangan. Selain itu, **faktor sumber daya finansial dan fasilitas juga memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini**. Meskipun **MAN Sidoarjo telah menyediakan sarana-prasarana yang memadai dan anggaran yang meningkat untuk mendukung Kurikulum Merdeka**, masalah dalam koordinasi dan pemeliharaan fasilitas yang kurang optimal tetap menjadi hambatan.
- Di sisi disposisi, **respons positif dari guru yang mendukung kebijakan ini menjadi faktor utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta membantu siswa beradaptasi dengan kurikulum baru**. Walaupun sempat ada kekhawatiran dari wali murid, penerapan kurikulum ini akhirnya dianggap memberikan manfaat bagi siswa. Komitmen kolektif dari guru, siswa, wali murid, dan kepala madrasah sangat mendukung keberhasilan kebijakan ini.
- Terakhir dalam struktur birokrasi, yaitu **akibat kurangnya koordinasi antarunit, keterbatasan waktu persiapan, dan distribusi juknis serta SOP yang tidak merata. Hal ini diperparah oleh rendahnya tingkat partisipasi guru dalam pelatihan, yang menyebabkan pemahaman terhadap Kurikulum Merdeka menjadi tidak seragam**. Masalah ini berdampak pada pelaksanaan yang kurang konsisten di lapangan, sehingga menyulitkan evaluasi dan pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan.

TERIMA KASIH

